

**PENGARUH DUKUNGAN POLITIK, PENDAPATAN DAERAH,
PERIODE JABATAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP
BUDGET FORECAST ERRORS PEMERINTAH DAERAHDI SUMATERA**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

YULIANA MAESA PUTRI
2013/1303476

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH DUKUNGAN POLITIK, PENDAPATAN DAERAH,
PERIODE JABATAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP *BUDGET
FORECAST ERRORS* PEMERINTAH DAERAH DI SUMATERA**

Nama : Yuliana Maesa Putri

NIM/TM : 1303476 / 2013

Jurusan : Akuntansi

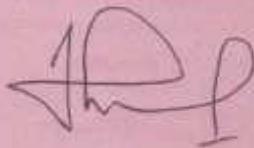
Keahlian : Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2018

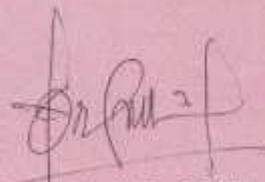
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Henri Agustin, SE, M. Sc. Ak
NIP. 19771123 200312 1 003

Pembimbing II



Halmawati, S.E., M.Si
NIP. 19740303 200812 2 001

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi**



Fefri Indra Arza, S.E., M.Sc., Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Dukungan Politik, Pendapatan Daerah, Periode
Jabatan dan Belanja Daerah terhadap *Budget Forecast Errors*
Pemerintah Daerah di Sumatera

Nama : Yuliana Maesa Putri

NIM/TM : 1303476 / 2013

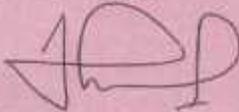
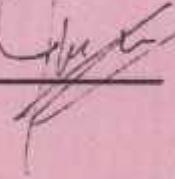
Jurusan : Akuntansi

Keahlian : Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, 06 Februari 2018

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Henri Agustin, SE, M. Sc. Ak	1.  _____
2.	Sekretaris	Halmawati, S.E., M.Si	2.  _____
3.	Anggota	Salma Taqwa, S.E., M.Si	3.  _____
4.	Anggota	Drs. Erinos NR, M.Si.Ak	4.  _____

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yuliana Maesa Putri
NIM / Tahun Masuk : 1303476/2013
Tempat / Tgl. Lahir : Payakumbuh / 26 Juli 1994
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Kel. Padang Tengah Balai Nan Duo, Payakumbuh Barat,
Provinsi Sumatera Barat
No. Hp / Telp : 0813-6499-5425
Judul Skripsi : Pengaruh Dukungan Politik, Pendapatan Daerah, Periode
Jabatan dan Belanja Daerah terhadap *Budget Forecast
Errors* Pemerintah Daerah Di Sumatera.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkannya dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana yang diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi

Padang, Februari 2018

Yana Menyatakan



Yuliana Maesa Putri
NIM. 1303476

Abstrak

Yuliana Maesa Putri (2013/1303476): Pengaruh Dukungan Politik, Pendapatan Daerah, Periode Jabatan dan Belanja Daerah Terhadap *Budget Forecast Errors* Pemerintah Daerah Di Sumatera.

**Pembimbing 1. Henri Agustin, SE, M. Sc. Ak
2. Halmawati, SE., M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dukungan politik, pendapatan daerah, periode jabatan dan belanja daerah *terhadap budget forecast errors*. Periode penelitian ini dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Penelitian ini menggunakan variabel dukungan politik, pendapatan daerah, periode jabatan dan belanja daerah sebagai variabel independen dan *budget forecast errors* sebagai variabel dependen. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini 32 kabupaten/kota di Sumatera. Penelitian ini menggunakan alat statistic analisis spss 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah dan belanja daerah berpengaruh terhadap *budget forecast errors* pemerintah daerah di Sumatera, sedangkan dukungan politik, periode jabatan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap *budget forecast Errors* pemerintah daerah di Sumatera.

Kata Kunci :*Budget Forecast Errors*, Dukungan Politik, Pendapatan Daerah, Periode Jabatan, Belanja Daerah.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Dukungan Politik, Pendapatan Daerah, Periode Jabatan dan Belanja Daerah Terhadap *Budget Forecast Errors* Pemerintah Daerah Di Sumatera ”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program studi S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Henri Agustin S.E, M.Sc, Ak selaku pembimbing I dan Ibu Halmawati, SE, M.Siselaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan transfer ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak dan Bapak Henri Agustin S.E, M.Sc, Ak selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Herlina Helmy, SE, M.S.Ak selaku dosen Penasehat Akademik (PA).

5. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Staf dosen serta karyawan / karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Ayahanda tercinta Chairman, Ibunda tercinta Chadijah, Uda Tacinto Ade Saputra Mandis, kakak kesayangan Mira Yuniatisertaponakan bunda yang lucu-lucu yang selalu bawel buat suruh bundanya cepat-cepat wisuda Syafa, Keyzi, Shauqi dan si bungsu Sidiq, dan Mamak tasayang Mak Ijun yang telah memberikan perhatian, semangat, do'a, dorongan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
8. Sahabat tercinta dadakan squad's yang telah setia menemani dan memberikan semangat hingga skripsi ini selesai.
9. Para senior dan junior di se-lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang memberikan semangat belajar, do'a, dan motivasi penulis untuk berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Prodi Akuntansi angkatan 2013 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Pendidikan Ekonomi yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, serta dukungan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan - rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
 BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	
1. Teori Agensi	10
2. <i>Grabing Hand Theory</i>	12
3. <i>Budget Forecast Errors</i>	13
4. Dukungan Partai Politik	18
5. Pendapatan Daerah.....	19
6. Karakteristik Kepala Daerah	26
7. Karakteristik Pemerintah Daerah	28
8. Belanja Daerah	29
B. Penelitian Yang Relevan	29
C. Hubungan Antara Variabel.....	36
D. Kerangka Konseptual	42
E. Hipotesis.....	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Populasi dan Sampel	44
1. Populasi	44
2. Sampel	44
C. Jenis dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	46
F. Teknik Analisis Data	49
G. Definisi Operasional	54

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Populasi dan Sampel Penelitian	56
B. Hasil Analisis Data.....	57
1. Statistik Deskriptif.....	57
2. Uji Asumsi Klasik	59
3. Pengujian Hipotesis	62
C. Pembahasan	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Keterbatasan	74
C. Saran dan Implikasi	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Ringkasan Penelitian Relevan.....	30
2. Sumber Data Penelitian.....	46
3. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	48
4. Hasil Pemilihan Sampel	56
5. Hasil Statistik Deskriptif	58
6. Hasil uji Normalitas (<i>Kolmogorov-Smirnov</i>).....	59
7. Hasil Uji Autokorelasi <i>Durbin Watson</i>	60
8. Hasil Uji Heteroskedastisitas	61
9. Hasil Uji Multikolinearitas.....	62
10. Hasil Uji Signifikan-F	63
11. Hasil Uji Signifikan-t	64
12. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kriteria pemilihan sampel.....	81
2. Hasil Estimasi Model Regresi Berganda	86

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 (direvisi menjadi UU 32/2004) tentang pemerintah daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi pemerintah daerah (eksekutif) dengan fungsi DPRD (legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Syahida, 2016, dalam Halim, 2001). Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif dan public. Dalam rangka mewujudkan otonomi, desentralisasi serta partisipasi rakyat dalam perencanaan pembangunan nasional Indonesia, pemerintah telah melakukan langkah penyempurnaan terhadap kebijaksanaan pembangunan. Setiap daerah diharapkan tidak hanya berorientasi pada daerahnya saja agar dapat mewujudkan otonomi daerah yang semakin meluas.

Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah antara lain adalah daerah otonomi mempunyai tiga sumber pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan penerimaan lain-lain serta hal tersebut merupakan era baru dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Indonesia, yaitu pelaksanaan desentralisasi untuk mewujudkan otonomi daerah.

Menurut UU No 32 Tahun 2004 pengertian otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu aspek penting yang ada di dalam hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik yaitu masalah keuangan daerah dan anggaran daerah (Winarna dan Murni,2007). Permasalahan keuangan daerah dan anggaran daerah yang dimaksud yaitu menyangkut kewenangan daerah otonom untuk mengatur sendiri pendapatan dan belanja daerahnya yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Menurut Sutaryo dan Tiara (2015), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah

dalam masa satu tahun anggaran yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD memiliki fungsi perencanaan yang berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi ini menjadikan APBD penting karena program kegiatan dan proyek pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan jika telah ada penetapan APBD sebelumnya (Carolina dan Sutaryo, 2014). APBD merupakan hal yang penting dan wajib maka harus disusun dengan tepat dan akurat. Namun, tingkat ketepatan dan keakuratan dalam penyusunan APBD tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya kesalahan. Kesalahan dalam penyusunan anggaran ini disebabkan karena tidak mudahnya melakukan penyusunan anggaran yang mengakibatkan banyaknya keterlambatan penyusunan APBD. APBD yang mengalami keterlambatan tersebut menandakan ketidakmampuan sebuah daerah untuk memproyeksikan atau meramalkan secara cepat dan tepat tingkat pendapatan dan pengeluaran. Ketepatan peramalan/proyeksi anggaran merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi keuangan daerah (Wagner dan Garret, 2004). Keadaan keuangan daerah yang tinggi cenderung akan menimbulkan kesalahan pada proyeksi keuangan daerah tahun berikutnya (Blanchard dan Leigh, 2013).

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didalamnya memuat pengeluaran pemerintah yang mendukung dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam belanja modal.

Pelaksanaan belanja modal tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah, yaitu dalam bentuk kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi, serta infrastruktur seperti jaringan jalan, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya. Indonesia sebagai negara yang sedang giat membangun, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan dorongan yang lebih kuat dan cepat bagi pergerakan roda perekonomian.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2006 merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah selama masa satu tahun anggaran sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember yang berisikan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD, dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Kusnandar dan Siswantoro (2012) berangapan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proyeksi keuangan daerah khususnya dalam hal belanja modal yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan anggaran yang sangat berpengaruh terhadap belanja modal dalam APBD, maka faktor keuangan lain yang berhubungan dengan anggaran bisa juga berpengaruh dan kemungkinan untuk terjadi *budget forecast errors* juga besar. Blanchard dan Leigh (2013) juga meneliti, dimana dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa realisasi anggaran khususnya belanja daerah pasti lebih besar dibandingkan dengan peramalan sebelumnya yang menandakan bahwa terjadi kesalahan

proyeksi anggaran. Brogan (2012) menyatakan bahwa tingkat *budget forecast errors* atau kesalahan proyeksi anggaran bukan hanya dipengaruhi dari faktor keuangan, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kesalahan proyeksi anggaran juga dipengaruhi oleh faktor politik.

Salah satu faktor politik yang terjadi yaitu kepala daerah yang sudah pernah memimpin dan mencalonkan kembali rentan terhadap terjadinya kesalahan tingkat proyeksi anggaran yang ditandai dengan meningkatnya pengeluaran selama masa pemilu. Mengenai hal ini kepala daerah harus mengelola keuangan publik dengan baik sementara pada saat yang sama kepala daerah juga harus memberikan *reward* kepada para pemilih untuk menjaga kekuasaannya.

Menurut Adzani dan Martani (2014), proses politik di Indonesia dicerminkan pada proses pemilihan umum. Pemilihan umum kepala daerah sebagai arena kompetisi antar kandidat calon kepala daerah yang dicalonkan oleh koalisi partai politik, fungsi partai politik sebagai alat untuk memobilisasi dukungan relatif kecil sehingga kandidat yang ingin memenangkan pilkada harus sebanyak mungkin memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi politik untuk memperoleh dukungan politik karena kompetisi lebih terlihat terhadap pengaruh figur kandidat.

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang nantinya akan menambah ekuits dana (Nordawan, Iswahyudi dan Maulida, 2009). PAD dapat dijadikan

indikator dalam menilai kemandirian setiap daerah dalam mengelola keuangan daerahnya (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Penelitian yang meneliti dan membahas mengenai *budget forecast errors* atau tingkat kesalahan proyeksi anggaran masih sangat jarang dilakukan di Indonesia, hal ini didasarkan pada *review* artikel dalam Simposium Nasional Akuntansi VI tahun 2003 sampai dengan tahun 2016 yang berjumlah 2.239, dari keseluruhan artikel tersebut terdapat 308 artikel yang membahas tentang akuntansi sektor publik dan tentang APBD berjumlah 65 artikel. Dari 65 artikel terkait APBD adalah pengaruh faktor keuangan dan non keuangan terhadap *budget forecast errors* Pemda (Kusuma dan Sutaryo, 2016). Kepala daerah dengan status *incumbent* memanfaatkan APBD untuk pencalonan kembali sebagai kepala daerah dan mempengaruhi proporsi belanja bantuan sosial dan belanja hibah (Alam dan Ritonga, 2010). Dugaan potensi penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) akan meningkatkan ketika para kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada periode pertama lalu maju kembali sebagai calon *incumbent* berada pada masa titik krusial, mengingat mereka harus berkompetisi lagi agar tetap menjabat. Sebagai calon kepala daerah pada pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), *incumbent* cenderung untuk melakukan politisasi anggaran.

Pertumbuhan ekonomi, PAD dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (Kusnandar dan Siswantoro, 2012) dan perilaku *opportunistic* legislatif dalam penganggaran daerah (Abdullah

dan Asmara, 2006) serta adanya kesalahan proyeksi anggaran yang terjadi pada pemerintahan Kota Banda Aceh (tribunnews.com, 2014), dimana kesalahan perhitungan APBA yang menyebabkan penghapusan 300 proyek yang seharusnya dilakukan pada anggaran yang telah ditetapkan. Kesalahan dalam prediksi APBA ini bukan pada tahun 2015 saja terjadi tetapi sudah beberapa kali dan menurut ahli ekonomi masalah ini terjadi terkait dengan keseriusan dalam mengelola anggaran yang telah disediakan, kurangnya kinerja dari anggota pemerintahan Aceh dan kebutuhan akan pemimpin yang visioner bukan hanya untuk coba-coba dalam pembangunan daerahnya terutama dalam menggunakan anggaran yang merupakan uang dari rakyat.

Metrotvnews.com, Palembang (2013), memberitakan bahwa terjadi kesalahan dalam penganggaran anggaran terutama dalam anggaran dana hibah. Penganggaran dana hibah dilakukan jika ada usul dari SKPD, namun dalam kasus ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) yang sekaligus menjadi Kepala BPKAD, Bappeda dan Dispenda sepakat mengacu pada anggaran tahun 2012 karena belum ada usulan dari SKPD. Kesalahan tersebut berawal dari system penganggaran yang salah serta perilaku *opportunistic* legislatif didalamnya yang mengakibatkan kerugian Negara hingga mencapai Rp 21 miliar.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Dukungan Politik, Pendapatan Daerah, Periode Jabatan, dan Belanja daerah terhadap *Budget Forecast Errors* Pemerintah Daerah Di Sumatera”** dimana perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada daerah penelitiannya serta perbedaan pada tahun yang akan diteliti oleh peneliti.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh dukungan politik terhadap *budget forecast errors* pada Pemerintah Daerah di Sumatera ?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan daerah terhadap *budget forecast errors* pada Pemerintah Daerah di Sumatera ?
3. Bagaimana pengaruh periode jabatan terhadap *budget forecast errors* pada Pemerintah Daerah di Sumatera ?
4. Bagaimana pengaruh belanja daerah terhadap *budget forecast errors* pada Pemerintah Daerah di Sumatera ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh dukungan politik terhadap *budget forecast errors* pada Pemerintah Daerah di Sumatera.

2. Pengaruh pendapatan daerah terhadap *budget forecast errors* pada Pemerintah Daerah di Sumatera.
3. Pengaruh periode jabatan terhadap *budget forecast errors* pada Pemerintah Daerah di Sumatera.
4. Pengaruh belanja daerah terhadap *budget forecast errors* pada Pemerintah Daerah di Sumatera.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak dibawah ini, yaitu :

1. Bagi penulis

Menambah pengetahuan dalam hal penilaian mengenai apasaja yang mempengaruhi *budget forecast errors* di Pemerintah Daerah Sumatera.

2. Bagi objek penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana bagi pemerintah daerah mengenai apasaja yang mempengaruhi dan penyebab terjadinya *budget forecast errors*, sehingga lebih bijaksana dalam mengelola anggaran yang ada, serta dapat mengurangi kesalahan yang sama pada perkiraan anggaran tahun berikutnya.

3. Bagi perguruan tinggi

Menjadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah pengetahuan pembaca.

BAB II

KAJIAN TEORI, HUBUNGAN ANTAR VARIABEL, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. KAJIAN TEORI

1. Teori Agensi

Teori agensi adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, dengan satu pihak (*agent*) yang setuju untuk bertindak dengan persetujuan pihak yang lain (*principal*). Menurut Lane (2003a) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi public. Ia mengatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan principal-agen (Lane, 2000:12-13). Menurut Colombatto (2001), adanya *discretionary power* di salah satu pihak akan menimbulkan pelanggaran atas kontrak keagenan, seperti terjadinya perilaku *rent-seeking* dan korupsi. Dalam penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif (Smith dan Bertozzi, 1998). Lupia dan McCubbins (2000) mengingatkan bahwa pendelegasian memiliki konsekuensi tidak terkontrolnya keputusan agen oleh principal. Mereka menyebut abdikasi, yakni adanya kondisi dimana agen tidak dipagari dengan aturan bagaimana tindakan mereka berpengaruh terhadap kepentingan prinsipal.

Menurut Halim dan Abdullah (2006) terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak dalam hubungan keagenan yaitu pemberi kewenangan atau kekuasaan disebut *principal* dan penerima kewenangan disebut agen.

Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan teori agensi sebagai hubungan keagenan antara rakyat dengan pemerintah daerah, yaitu berupa hubungan yang timbul akibat adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat sebagai *principal* yang menggunakan pemerintah sebagai *agent* untuk menyediakan jasa. Hal ini ditunjukkan dengan wajibnya pemerintahan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya melalui pelaporan keuangan yang ditunjukkan untuk rakyat. Dengan demikian maka rakyat dapat turut serta mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Timbul permasalahan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat adanya kesenjangan informasi yang tidak seimbang antara *principal* dan *agent* yang sering disebut dengan asimetri informasi. Arifah (2012) dalam Sutaryo dan Tiara (2015) asimetri informasi ini dapat menimbulkan permasalahan yang disebabkan dengan adanya kesulitan *principal* untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan *agent*. Informasi yang diterima oleh *principal* terkadang kurang lengkap sehingga tidak dapat menunjukkan kinerja *agent* yang sebenarnya dalam mengelola kekayaan *principal*. Kurangnya informasi yang diperoleh prinsipal bisa dimanfaatkan oleh agen untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan kelompok (Hartanto dan Probohudono, 2013).

Penelitian Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan adanya permasalahan dalam *agency theory*, yaitu moral *hazard* bahwa

permasalahan uang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja dan *adverse selection* bahwa suatu keadaan yang menggambarkan prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

2. *Grabbing Hand Theory*

Menurut Shleiver dan Vishny (1997), Tokoh politik yaitu politisi dan birokrat mengambil keuntungan dari posisi mereka di pemerintahan untuk mengambil manfaat pribadi. Pemerintah digambarkan sebagai *grabbing hand* yang dikendalikan oleh politisi yang tidak memaksimalkan kesejahteraan sosial dan lebih memilih untuk mengejar tujuan mereka sendiri.

Pemegang kekuasaan dalam hal ini kepala daerah akan berupaya memanfaatkan kekuasaan sebagai penyusun APBD untuk mencapai tujuan pribadi. Dukungan politik dari legislatif yang diterima oleh eksekutif (kepala) akan mengurangi kontrol terhadap eksekutif saat menyusun APBD sehingga memudahkan eksekutif untuk memfinalisasi kepentingan pribadi. Penyusunan serta perencanaan APBD yang tidak terkontrol dengan baik akan berakibat pada kesalahan dalam menganggarkan APBD, karena APBD yang disusun tidak sesuai dengan kebutuhan daerah yang sebenarnya.

Selain itu menurut Maciandaro dan Quintyn (2008), pembuat kebijakan juga merupakan seorang politisi yang dipilih sebelumnya oleh masyarakat, untuk itu mereka tentunya harus menyenangkan atau mengambil simpati dari masyarakat atau para pemilih agar memilih mereka pada pemilu. Pemerintah “*grabbing hand*” cenderung memberi keuntungan hanya kepada kelompok kepentingan kecil tapi terorganisir dengan baik. Pembuat kebijakan *grabbing hand* ditangkap oleh kelompok minat tertentu, yang mendapat dukungan dianggap penting untuk pemilihan ulang. Pada penelitian ini kita dapat dilihat bahwa melalui pemilu pembuat kebijakan bisa terpengaruh dan kelompok kepentingan dapat mempengaruhi melalui kontribusi eksplisit atau implisit, yang cukup penting untuk meningkatkan peluang memenangkan pemilihan.

3. *Budget Forecast Errors*

Peralaman (*forecasting*) adalah seni dan ilmu untuk memprediksi peristiwa-peristiwa masa depan dengan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa depan dengan menggunakan beberapa bentuk model matematis (Render & Heizer, 2001 dalam Sutaryo dan Tiara, 2013). Peramalan dibuat untuk meminimalisir pengaruh ketidakpastian terhadap sebuah permasalahan. Sehingga dalam melakukan peramalan diupayakan untuk tidak terjadi kesalahan meramal (*forecast errors*).

Menurut Taylor (2004) dalam Sutaryo dan Tiara(2013) dalam hubungannya dengan horizon waktu peramalan terbagi atas beberapa kategori yaitu:

- a. Peramalan jangka pendek (*short-range forecast*), peramalan jangka menengah (*medium-range forecast*), peramalan jangka panjang (*long-range forecast*). Peramalan jangka pendek (*short-range forecast*) mencakup masa depan yang dekat (*immediate future*) dan memperhatikan kegiatan harian suatu perusahaan bisnis, seperti permintaan harian atau kebutuhan sumber daya harian.
- b. Peramalan jangka menengah (*medium-range forecast*) mencakup jangka waktu satu atau dua bulan sampai satu tahun. Ramalan jangka waktu ini umumnya lebih berkaitan dengan rencana produksi tahunan dan akan mencerminkan hal-hal seperti puncak dan lembah dalam suatu permintaan dan kebutuhan untuk menjamin adanya tambahan untuk sumber daya untuk tahun berikutnya.
- c. Peramalan jangka panjang (*long-range forecast*) mencakup periode yang lebih lama dari satu atau dua tahun. Ramalan ini berkaitan dengan usaha manajemen untuk merencanakan produk baru untuk pasar yang berubah, membangun fasilitas baru, atau menjamin adanya pembiayaan jangka panjang.

Peramalan adalah kegiatan yang memperkirakan apa yang akan terjadi padamasa yang akan datang. Sedangkan ramalan adalah suatu

situasi atau kondisi yang diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang. Ramalan dapat didasarkan atas bermacam-macam cara yang kita kenal dengan metode peramalan.

Metode peramalan adalah cara untuk memperkirakan secara kuantitatif apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang berdasarkan data yang relevan pada masa lalu, dan karena itu maka metode peramalan ini dipergunakan dalam peramalan yang objektif. Metode peramalan ini sangat berguna, karena akan membantu dalam mengadakan pendekatan analisa terhadap tingkah laku atau pola dari data yang lalu, sehingga dapat memberikan cara pemikiran, pekerjaan dan pemecahan yang sistematis dan pragmatis, serta memberikan tingkat keyakinan yang lebih besar atas ketepatan hasil ramalan yang disusun.

Pada dasarnya metode peramalan kuantitatif ini dapat dibedakan atas:

- a. Metode peramalan yang didasarkan atas penggunaan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu, yang merupakan deret waktu (*time-series*).
- b. Metode peramalan yang didasarkan atas penggunaan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel lain yang memengaruhinya, yang bukan waktu dan bisa disebut dengan sebab akibat (*causal methods*).

Dalam metode peramalan secara kuantitatif terdapat beberapa metode yaitu:

- a. Metode *smoothing*, yaitu digunakan untuk mengurangi ketidak-teraturan musiman dari data yang lalu maupun kedua-duanya, dengan membuat rata-rata tertimbang dari sederetan data yang lalu. Ketepatan dari peramalan dengan metode ini akan terdapat pada peramalan jangka pendek, sedangkan untuk peramalan jangka panjang ketepatannya akan berkurang. Data yang dibutuhkan untuk penggunaan metode ini minimal selama dua tahun.
- b. Metode *box jenkins*, yaitu dengan menggunakan dasar deret waktu dengan model matematis, agar kesalahan yang terjadi dapat diminimalkan. Oleh karena itu penggunaan metode ini membutuhkan identifikasi model dan estimasi parameternya. Metode ini sangat baik ketepatannya untuk peramalan jangka pendek, sedangkan peramalan untuk jangka panjang ketepatannya kurang baik. Data yang dibutuhkan penggunaan metode peramalan ini minimum dua tahun dan lebih baik bila data yang dimiliki lebih dari dua tahun.
- c. Metode *proyeksi trend* dengan regresi merupakan dasar garis trend untuk persamaan matematis, sehingga dengan dasar persamaan tersebut dapat diproyeksikan hal yang diteliti untuk masa depan. Untuk peramalan jangka pendek maupun jangka panjang, ketepatan peramalan dengan menggunakan metode ini sangat baik.

Dalam melakukan peramalan (*forecasting*) sebuah negara belum tentu mampu untuk memproyeksikan atau meramalkan tingkat

pendapatan dan pengeluaran secara tepat dan akurat, hal ini dapat mempengaruhi keuangan negara (Wagner dan Garret, 2004). Memproyeksikan atau meramalkan anggaran digunakan untuk mengurangi ketidakpastian dalam menentukan jumlah anggaran (Brogan, 2012).

Penganggaran publik menetapkan prioritas pemerintah bukan hanya untuk menentukan berapa besar dana yang tersedia untuk dihabiskan, namun juga harus menentukan kebijakan dan program yang akan diimplementasikan (Clynch dan Lauth, 1991). Dari perspektif ini, perkiraan pendapatan mengarahkan seluruh kebijakan dan program pemerintahan (Cornia, Nelson dan Wilko, 2004). Dalam jangka pendek, perkiraan anggaran pendapatan dan belanja tahunan cenderung berisi oleh faktor-faktor politik, sementara perkiraan jangka panjang bias dengan perhitungan politik (Brogan, 2012).

Oleh karena itu dalam jangka pendek proses pengembangan perkiraan pendapatan dan belanja anggaran berfungsi sebagai alat politik oleh calon *incumbent* yang berusaha untuk mengumpulkan pemilih dengan kinerja yang dilakukannya terutama pada masa pemilu (Bruck dan Stephan, 2006). Untuk perkiraan jangka panjang bisa dipengaruhi dari faktor keuangan yaitu realisasi pendapatan dan belanja. Blanchard dan Leigh (2013) membuktikan bahwa pendapatan dan biaya bisa mempengaruhi kesalahan proyeksi dalam hal perbedaan realisasi dengan anggaran.

4. Dukungan Partai Politik

Latar belakang partai politik (*political background*) merupakan latarbelakan dari seseorang yang beraktifitas di dunia politik. Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2015 pasal 1, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Menurut Sachsenroder (1998) dukungan dari partai politik atas dukungan kepada kepala daerah menimbulkan konsekuensi kesepakatan antara calon kepala daerah dan partai politik dalam pembiayaan kampanye yang terkadang mengabaikan ketentuan yang berlaku.

Rochmatullah dan Probohudono (2014). menyatakan bahwa koneksi politik memiliki dampak yang multidimensional dalam pengaturan pemerintahan di suatu negara. Hal ini dapat terjadi dalam perumusan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menurut Garamfalvi (1997) dan Mardiasmo (2009) penganggaran dalam sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang cukup tinggi. Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian Nofsinger (2004) yang memperoleh bukti bahwa tekanan politik mempengaruhi anggaran. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme

pengambilan keputusan dalam perencanaan APBN yang menyertakan mekanisme lobi, negosiasi, adu argumen dan konflik kepentingan yang harus diakomodasi dalam produk politik yang dihasilkan (Ritonga dan Alam 2010).

5. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yang dikutip dari buku “Himpunan Peraturan Pelaksanaan UU Otonomi Daerah” yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. sedangkan menurut Abdul Halim (2002) menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Berdasarkan dari berbagai pengertian pendapatan daerah diatas diambil kesimpulan bahwa pendapatan daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat ditinjau dari tingkat kenaikan aktiva ataupun penurunan utang yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Sumber-sumber pendapatan

daerah sebagai penerimaan kas daerah yang merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan, mengoptimalkan kemakmuran rakyat yaitu menumbuh kembangkan masyarakat disegala bidang kehidupan. Pendapatan daerah dalam APBD dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lainnya yang sah.

Untuk melaksanakan hak dan kewajiban serta tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus memiliki rencana yang matang untuk mensejahterakan rakyat. Rencana tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam setiap kegiatan pelaksanaan tugas. Oleh karena itu rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan negara dan rencana tersebut perlu dituangkan dalam bentuk anggaran (Ghozali dan Sabeni, 2008).

Menurut Munandar (2000) definisi anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan organisasi yang dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Anggaran merupakan sebuah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu (Nafarin, 2004). Menurut Mardiasmo (2002) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial*, sedangkan penganggaran adalah sebuah proses yang digunakan untuk

mempersiapkan suatu anggaran. Freeman & Shoulders (2003) dalam Sutaryo dan Tiara (2015) beranggapan bahwa anggaran sebagai suatu proses pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat tidak terbatas dan merupakan rencana kerja dalam suatu periode yang telah ditetapkan dalam satuan mata uang. Pengertian lain dari Bastian (2006) berpendapat bahwa anggaran merupakan paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan salah satu *instrument* kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa :

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”

Menurut Saragih (2003) dalam Sularno dkk(2013) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dijelaskan bahwa :

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah didalam meningkatkan potensi perekonomian daerah.”

Menurut Halim (2004) dalam Sularno dkk(2013) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu :

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktifitas-aktifitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan, jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka, periode anggaran, yaitu biasanya satu tahun.”

Penganggaran di organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung unsur politik yang tinggi. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan pemerintah daerah dalam masa satu tahun anggaran yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pedoman penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Menurut Nordiawan, Iswahyudi dan Maulidah (2009) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Secara garis besar, struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah dan belanja daerah. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan

uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana. merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (Nordiawan, Iswahyudi dan Maulidah, 2009). Sebaliknya semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali merupakan definisi dari belanja daerah. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

a. Struktur APBD

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

“ Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.”

Sedangkan menurut Halim (2004) dalam Sularno dkk(2013) terkait dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal yaitu :

“ Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja digolongkan menjadi 4 yakni belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tak tersangka. Belanja aparatur daerah diklasifikasi menjadi 3 kategori yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan. Belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi 3 yakni belanja administrasi umum, belanja operasi, dan pemeliharaan dan belanja modal. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan yaitu: sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah : sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan dan transfer dari dana cadangan. Sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri dari : pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan dan sisa lebih anggaran tahun sekarang.”

Dari kedua kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal terdiri atas tiga bagian, yaitu:

- 1) Anggaran pendapatan yang terdiri atas :
 - a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
 - b) Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - c) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

- 2) Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.
- 3) Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

b. Fungsi APBD

Fungsi APBD pada dasarnya sama dengan fungsi APBN. Dalam artikel yang peneliti baca ([http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_Belanja_Daerah)) disebutkan bahwa fungsi APBD terdiri dari :

- 1) Fungsi otorisasi
- 2) Fungsi perencanaan
- 3) Fungsi pengawasan
- 4) Fungsi alokasi
- 5) Fungsi distribusi
- 6) Fungsi stabilitas

Penjelasan dari fungsi APBD di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

- 2) Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 4) Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah.
- 5) Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- 6) Fungsi stabilitas memiliki makna, bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

6. Karakteristik Kepala Daerah

Definisi karakteristik adalah ciri-ciri khusus; mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu lain. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang pemerintah daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 24 ayat 1 dan 2 berisi (1) setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati dan untuk kota disebut Walikota.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 27 ayat 1 (i), kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah, sehingga dibutuhkan kompetensi dari kepala daerah yang memadai untuk melaksanakan hal tersebut. Penelitian dari Murni dan Winarna (2007) menggunakan proksi karakteristik kepala daerah dengan cara membagi antara *personal background* dan *political background*. *Personal background* meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang pendidikan dan latar belakang pekerjaan, sedangkan *political background* meliputi pengalaman politik, pengalaman di DPRD, latar belakang partai politik, latar belakang ideologi partai politik dan asal komisi. Menurut Hambrick dan Mason (1984) *upper echelon characteristics* dapat menjelaskan kompetensi dari seorang eksekutif yaitu *age, functional tracks, other career experiences, education, socio economic roots, financial position* dan *group characteristics*.

7. Karakteristik Pemerintah Daerah

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa pengertian pemerintahan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah yang menandai sebuah daerah tersebut dan dapat membedakannya dengan daerah yang lain. Karakteristik daerah diharapkan dapat menjelaskan kepatuhan pengungkapan wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sehingga karakteristik pemerintah daerah merupakan prediktor kepatuhan pengungkapan wajib (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011).

Fitriasari dan Mustikarini (2012) dalam penelitiannya menggunakan proksi karakteristik pemerintah daerah berupa ukuran pemerintah daerah, penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan besarnya belanja pemerintah daerah. Patrick (2007) menggunakan budaya organisasi, struktur organisasi dan lingkungan eksternal sebagai proksi dari variabel karakteristik pemerintah daerah Pennsylvania. Hartanto dan Probohudono (2013) menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran pemerintah daerah, populasi penduduk, belanja pegawai, pajak daerah dan HDI setiap daerah.

Sutaryo dan Winarna (2013) menggunakan karakteristik pemerintah daerah di Indonesia yaitu pemerintah daerah dan ukuran pemerintah daerah. Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) menggunakan variabel ukuran pemerintah daerah, jumlah SKPD dan status daerah dalam penelitiannya sebagai proksi dari karakteristik pemerintah daerah.

8. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan biaya atau penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau depleksi asset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, "Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih". Secara umum belanja daerah dalam APBD dikelompokkan yaitu, belanja administrasi umum, belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, belanja tak terduga. Blanchard dan Leigh (2013) membuktikan bahwa pendapatan dan biaya bisa mempengaruhi kesalahan proyeksi dalam hal perbedaan realisasi dengan anggaran.

B. PENELITIAN YANG RELEVAN

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan mengenai topic yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Relevan

No	Sumber	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	TIARA RAHMA KUSUMA dan SUTARYO <i>Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS (SNA 18 Medan)</i>	Pengaruh Faktor Keuangan Dan Non Keuangan Terhadap <i>Budget Forecast Errors</i> Pemerintah Daerah Di Indonesia	Untuk menguji pengaruh Periode Jabatan, Dukungan Politik, Pertumbuhan Pendapatan dan Pertumbuhan Belanja terhadap <i>Budget Forecast Errors</i> Pemerintah Daerah di Indonesia	Dukungan politik, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja berpengaruh terhadap <i>budgetforecast errors</i> atau kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah di Indonesia, sedangkan periode jabatan tidak berpengaruh terhadap <i>budgetforecast errors</i> atau kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah Indonesia.
2	Brogan O dan Leigh D. Tahun 2013. Public administrati on Quarterly SPRING. Rider University. 84-93	<i>The political of budgeting: Evaluation the effect of the political Election cycle ob state-Level budget forecast errors.</i>	menguji hipotesis di tingkat negara bagian dengan mengembangkan tiga pendekatan yang berbeda untuk memperkirakan perkiraan anggaran. Pertama, model naif hanya memperkirakan kesalahan perkiraan anggaran berdasarkan data ekonomi (misalnya penerimaan pajak, pengeluaran)Kedua , model strategis, yang dibangun pada model naif, menggabungkan variabel politik dalam memperkirakan kesalahan	tingkat <i>budget forecast errors</i> atau kesalahan proyeksi anggaran bukan hanya dipengaruhi dari faktor keuangan, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kesalahan proyeksi anggaran bisa juga terjadi dari faktor politik

			perkiraan (misalnya kontrol pihak legislatif dan gubernur, faktor politik nasional). Terakhir, model insentif, yang dibangun pada kedua model sebelumnya, mengintegrasikan siklus politik dengan perkiraan anggaran (misalnya istilah di kantor, dekat dengan pemilu berikutnya).	
3	Blanchard O dan Leigh D. 2013. International Monetary Fund. IMF Working Paper.	<i>Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers.</i>	Tulisan ini meneliti hubungan antara pertumbuhan kesalahan perkiraan dan direncanakan fiskal konsolidasi selama krisis	realisasi anggaran khususnya belanja daerah pasti lebih besar dibandingkan dengan peramalan sebelumnya yang menandakan bahwa terjadi kesalahan proyeksi anggaran.
4	Kusnandar dan Dodik Siswanto Universitas Indonesia tahun 2012 Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin.	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal	menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah terhadap alokasi Belanja Modal	salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proyeksi keuangan daerah khususnya dalam hal belanja modal yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dikarenakan PAD berpengaruh terhadap belanja modal dalam APBD, maka faktor keuangan lain yang berhubungan dengan anggaran bisa juga berpengaruh dan kemungkinan untuk terjadi <i>budget forecast errors</i> juga besar
5	Mukul G. Asher Economic	<i>Accuracy of Budgetary Forecasts of</i>	menguji kesalahan dalam Perkiraan Anggaran dan	Kesalahan dalam memprediksi anggaran terjadi sangat rentan pada

	and Political Weekly, Vol. 13, No. 8	<i>Central Government, 1967-68 to 1975-76</i>	Perkiraan Revisi pendapatan dan pengeluaran dari Pemerintah India selama periode 1967-1968 untuk 1975-76	saat memperkirakan besarnya pendapatan serta pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintahan india pada periode tersebut.
6	Syukriy Abdullah Proceeding Simposium Nasional Akuntansi 16 Manado 2013	Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Pendekatan <i>Principal-Agent Theory</i>	untuk menguji secara empiris perilaku oportunistik legislator (DPRD) dalam proses penganggaran pemerintah daerah	Eksekutif sebagai penyusun rancangan anggaran memiliki informasi yang lebih lengkap daripada legislatif, yang bermakna adanya asimetri informasi antara keduanya. Sehingga dalam hal ini terdapatnya asimetri informasi. seperti eksekutif mengajukan anggaran yang lebih besar sebagai antisipasi atas ketidakpastian (<i>uncertainty</i>) pada masa yang akan datang (Krause,2002). Di sisi lain, legislatif yang memiliki waktu dan pengetahuan yang sangat terbatas untuk mempelajari rancangan anggaran akan berupaya mempengaruhi anggaran melalui kekuasaan (<i>power</i>) yang dimilikinya sebagai principal. Hal ini bisa mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam memperkirakan anggran.
7	Roel Beetsma, Benjamin Bluhm, Massimo Giuliadori, And Peter	<i>From Budgetary Forecasts To Ex Post Fiscal Data: Exploring The Evolution Of</i>	Mengetahui kesalahan dalam keseimbangan anggaran.	Kesalahan dalam memprediksi dan memperhitungkan anggaran mungkin timbul karena alasan politik dan strategis.

	Wierds (2012) <i>Contemporary Economic Policy</i>	<i>Fiscal Forecast Errors In The European Union</i>		
8	Tilman Bruck and Andreas Stephan (KYKLOS, Vol. 59 – 2006 – No. 1, 3–15)	<i>Do Eurozone Countries Cheat with their Budget Deficit Forecasts?</i>	menilai faktor penentu politik, pemilu dan kelembagaan kualitas anggaran defisit perkiraan untuk negara-negara zona euro sebelum dan setelah pengenalan Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan (Stability Growth Pact/SGP)	Adanya factor politik yang mempengaruhi dalam penganggaran pemerintah. makalah ini membuat empat kontribusi yang berbeda untuk ekonomi politik analisis kebijakan fiskal. Pertama, ini adalah kertas pertama, untuk pengetahuan kita, bahwa membuktikan adanya kecurangan sebelum pemilihan oleh pemerintah zona euro (Dibandingkan dengan pemerintah lain OECD) dalam melaporkan CITS anggaran sejak pengenalan SGP. Kedua, kita menerapkan teknik panel ekonometrik untuk analisis kesalahan perkiraan dari kedua zona euro dan non-zona euro OECD ekonomi, bukan hanya mempertimbangkan ekonomi zona euro. Ketiga, kita mendasarkan analisis kami pada dua perkiraan per tahun, yang meningkatkan kehalusan analisis ekonomi politik kita. Keempat, kertas kami menetapkan link baru antara literatur tentang kesalahan perkiraan ekonomi

				makro dengan itu pada politik siklus anggaran.
9	Rudolph G. Penner (2002)	<i>Dealing With Uncertain Budget Forecasts</i>	Mereview atau meninjau sejarah proyeksi anggaran masa lampau oleh kantor kongres anggran.	Kesalahan dalam memperkirakan anggaran selalu saja terjadi bahkan kesalahannya tersebut cukup besar. Kesalahan itu disebabkan oleh adanya perubahan proyeksi anggran uang dikarenakan oleh perubahan atau pergantian prakiraan ekonomi dan asumsi teknis yang umumnya jauh melebihi penyesuaian yang disebabkan oleh perubahan dalam kebijakan fiscal.
10	Susanna-Maria Paleologou University of Ioannina, Greece (2005)	<i>Political Manoeuvrings as Sources of Errors in Forecasts</i>	memeriksa kesalahan perkiraan berdasarkan pada model sederhana di mana kita mencoba untuk menjelaskan penyimpangan antara ramalan Maret anggaran dan perkiraan November, dan penyimpangan antara hasil dan perkiraan anggaran Maret di Inggris	Factor yang menjadi kesalahan dalam memperkiraan anggaran adalah pertama politik seperti ideology dan pemilu, Faktor kedua ekonomi terkait dengan tingkat aktivitas ekonomi yang diberikan oleh GDP (Gross Domestic Product), inflasi , pengangguran, tingkat suku bunga, pendapatan nominal dan konsumsi swasta.
11	Alfian Faiz Syahida (2016)	Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Karakteristik Inspektorat dan Faktor Keuangan Terhadap <i>Budget Forecast</i>	Memberikan bukti empiris terkait pengaruh dukungan politik, latar belakang pendidikan kepala daerah, gender kepala daerah, jenjang pendidikan	Dukungan politik, pendapatan daerah dan belanja daerah berpengaruh terhadap <i>budgetforecast errors</i> pemerintah daerah di Indonesia, sedangkan latar belakang pendidikan kepala daerah, <i>gender</i> kepala

		<i>Errors Pemerintah Daerah di Indonesia</i>	inspektorat daerah, pendapatan daerah dan belanja daerah terhadap <i>budget forecast errors</i>	daerah dan jenjang pendidikan inspektorat daerah tidak berpengaruh pada <i>budget forecast error</i> pemerintah daerah di Indonesia.
12	Stuart Bretschneider And Larry Schroeper International Journal of Forecasting 4 (1988) 33-43 North-Holland	<i>Evaluation Of Commercial Economic Forecasts for use In Local Government Budgeting</i>	makalah ini mengusulkan sebuah pendekatan untuk mengevaluasi prakiraan makroekonomi komersial seperti yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam peramalan pendapatan.	bahwa varians dari kesalahan perkiraan diminimalkan dengan baik dengan mengeksplorasi variabel eksogen menggunakan metode time series, atau mengandalkan langsung pada waktu series Metode ekstrapolasi untuk meramalkan pendapatan. Dan kesalahan perkiraan anggaran pemerintah karena adanya pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran yang tidak dapat diperkirakan dengan tepat.
13	Maryam Nur Fajrina dan Leny Suzan, SE.,M.Si. (2007) Proceeding Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Daerah dan Umum Dana Alokasi untuk Belanja Modal di tahun anggaran Pemerintah Kota Bogor 2009-2013	Terdapat signifikan secara bersamaan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Daerah dan Dana Alokasi Umum untuk Belanja Modal amounte untuk 98,4% dan dampak sebagian Pertumbuhan tidak ada yang signifikan positif pada Belanja Modal, regional pendapatan berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal dan pengaruh yang signifikan Dana Alokasi Umum positif pada Belanja Modal.

C. HUBUNGAN ANTARA VARIABEL

1. Hubungan antara Dukungan Politik terhadap *Budget Forecast Errors*

Menurut Adzani dan Martani (2014) proses politik merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan arah kebijakan pemerintah. Menurut Gourevitch (2003) proses politik itu juga dapat mempengaruhi tata kelola keuangan pemerintahan melalui berbagai macam cara baik melalui group kepentingan (partai politik), hubungan antar masyarakat (*cross coalition*) dan hubungan eksekutif-legislatif sehingga dapat mempengaruhi tata kelola pemerintahan yang baik.

Proses politik di Indonesia dicerminkan pada proses pemilihan umum. Pemilihan umum kepala daerah sebagai arena kompetisi antar kandidat calon kepala daerah yang dicalonkan oleh koalisi partai politik, fungsi partai politik sebagai alat untuk memobilisasi dukungan relatif kecil sehingga kandidat yang ingin memenangkan pilkada harus sebanyak mungkin memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi politik untuk memperoleh dukungan politik karena kompetisi lebih terlihat terhadap pengaruh figur kandidat (Adzani dan Martani, 2014). Semakin banyak kepala daerah tersebut memiliki dukungan partai terutama yang memiliki kedudukan di DPRD maka akan semakin besar kemungkinan terjadi *budget forecast errors* dikarenakan usulan apapun mengenai anggaran dari kepala daerah akan selalu disetujui karena di dalamnya terdapat mekanisme politik yang lebih memikirkan kepentingan kelompok partai politik.

Dukungan politik yang diperoleh memberikan manfaat strategis bagi partai politik, mereka memberikan alternatif yang berbeda kepada para pemilih dengan mengambil pandangan yang bersaing mengenai proyeksi tingkat pendanaan dan perkiraan pendapatan sehingga menandakan kesalahan perkiraan anggaran terutama dalam proyeksi anggaran pendapatan / belanja (Blancard dan Leigh, 2013).

2. Hubungan antara Pendapatan Daerah terhadap Budget Forecast Errors

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana. Merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (Nordian, Iswahyudi dan Maulidah, 2009). Salah satu komponen dari total pendapatan dalam APBD yaitu pendapatan asli daerah. PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi setiap daerah sebagai perwujudan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal tersebut mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian dalam keuangan daerah. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, Pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah (Harianto dan Adi, 2007 dalam Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Dari

data yang tertuang dalam APBD dapat dilihat kondisi keuangan Pemerintah daerah. Dari sisi pendapatan, dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan dapat dilihat kemandirian suatu daerah, semakin tinggi nilainya semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Menurut Kusnandar dan Siswanto (2012) peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. PAD juga dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai kemandirian setiap daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Sehingga semakin besar penerimaan PAD maka daerah tersebut semakin mandiri dan bebas mengalokasikan pendapatan yang diterima untuk anggaran tahun berikutnya. Daerah yang semakin bebas mengalokasikan PAD yang diterima maka akan semakin besar kemungkinan untuk terjadi *budget forecast errors*.

Keputusan anggaran sangat tergantung pada perubahan pendapatan. Peramalan pendapatan merupakan sumber penting dari ketidakpastian anggaran yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan. Pendapatan aktual bisa saja melebihi atau kurang dari yang direncanakan, sehingga ketika terjadi *mismatches* antara pendapatan aktual dengan yang diprediksi, maka pemerintah daerah harus melakukan *reopen* dan *rebalance* atas anggarannya (Cornia, et al., 2004 dalam Abdullah & Nazry, 2015). Varian anggaran dapat diketahui besarnya setelah anggaran terealisasi. Selisih antara anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan ini menunjukkan ketidak-akuratan dalam penetapan target

anggaran pada proses penyusunan anggaran yang menunjukkan bahwa adanya kesalahan dalam proyeksi anggaran.

3. Hubungan antara Periode Jabatan terhadap *Budget Forecast Errors*

Untuk menentukan kepala daerah dari setiap daerah kabupaten/kota di Indonesia menggunakan sistem pemilihan umum (pemilu). Menurut PERPPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa kepala daerah yang memenangkan suara pemilu memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Kepala daerah yang mencalonkan kembali dalam jabatan yang sama disebut dengan calon *incumbent*. Dikarenakan kepala daerah tersebut memiliki kesempatan untuk mencalonkan kembali maka pada periode pertama kepala daerah tersebut cenderung membuat citra yang baik agar pada periode kedua nanti dapat dipilih kembali.

Menurut Alam dan Ritonga (2010) dugaan potensi penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) akan meningkat ketika para kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada periode pertama lalu maju kembali sebagai calon *incumbent* berada pada masa titik krusial, mengingat mereka harus berkompetisi lagi agar tetap menjabat. Sebagai calon kepala daerah pada pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), *incumbent* cenderung untuk melakukan politisasi anggaran. Abdullah dan Asmara (2006) menduga power legislatif yang sangat besar

menyebabkan diskresi atas penggunaan PAD tidak sesuai dengan preferensi publik. Aidt dkk(2011) dalam Veiga dan Boukari (2016) menyelidiki secara teoritis dan empiris interaksi antara Insentif untuk menghasilkan siklus anggaran politik dan kompetisi pemilihan.

Memperluas Model Rogoff, para penulis ini menunjukkan bahwa ketika pemilihan umum yang dekat diharapkan, Insentif incumbent untuk memanipulasi kebijakan fiskal untuk tujuan pemilihan meningkat, sehingga meningkatkan ukuran siklus anggaran politik (Rogoff, 1990 dalam Veiga & Boukari, 2016). Dalam konteks peramalan anggaran, fenomena ini muncul melalui bias anggaran. Bias proyeksi bisa membantu partai incumbent dalam perjuangannya untuk terpilih kembali (Boschoff & Gohout, 2010 dalam Veiga & Boukari, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Garamfalvi (1997) menemukan bukti empiris yang kuat bahwa pengeluaran Pola pegawai pemerintah, Yang pada gilirannya memilih pemerintah incumbent, memiliki dampak lebih besar terhadap pertumbuhan pendapatan di masa depan daripada preferensi masyarakat terhadap pendapatan dan pengeluaran, hal ini menyebabkan pembuat kebijakan menanyakan keadaan apa, terlepas dari prakiraan, menyebabkan proyeksi menjadi salah. (Brogan, 2012).

4. Hubungan antara Belanja Daerah terhadap *Budget Forecast Errors*

Belanja daerah yaitu semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya

kembali (Nordiawan, Iswahyudi dan Maulidah, 2009). Menurut Permendagri no. 37 tahun 2014 tahapan awal penyusunan APBD yaitu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD yang disusun memuat rencana kerja dan pendanaan yang akan digunakan, sehingga anggaran belanja akan disusun sebelum menentukan pendapatan yang akan diterima. Rencana kerja yang semakin banyak akan menyebabkan realisasi belanja yang semakin besar, maka kemungkinan untuk mengalokasikan anggaran belanja untuk tahun berikutnya juga semakin meningkat. Blanchard dan Leigh (2013) beranggapan bahwa realisasi anggaran khususnya belanja daerah pasti lebih besar dibandingkan dengan peramalan sebelumnya yang menandakan bahwa terjadi kesalahan.

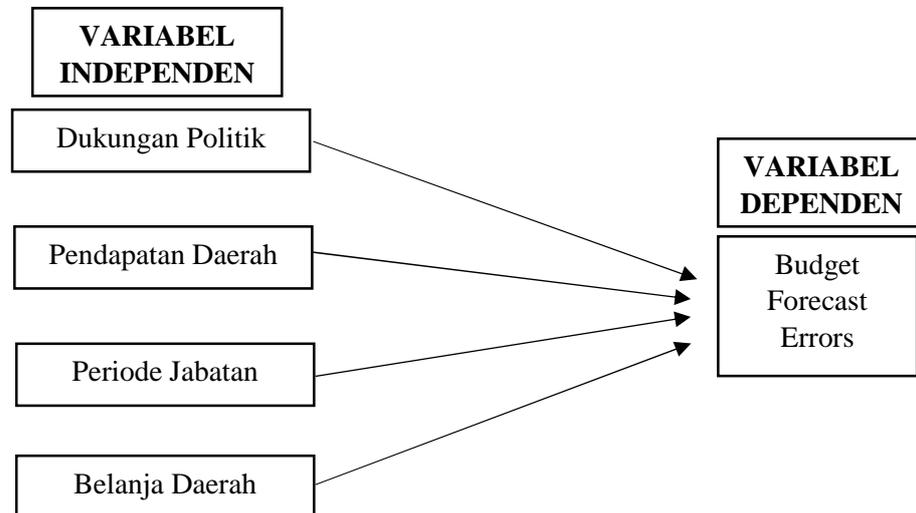
Hal yang sama terjadi antara eksekutif dan legislatif di pemerintah daerah. Asas penganggaran belanja adalah asas maksimal, yakni menetapkan alokasi belanja sebagai batas maksimal sumberdaya yang boleh digunakan oleh unit kerja/pemerintah daerah. Varian belanja yang besar mencerminkan ketidakakuratan dalam menentukan besaran anggaran. Pada akhirnya, gabungan dari usulan anggaran SKPD akan membentuk anggaran pemerintah daerah. Oleh karena itu, akumulasi senjangan dan varian anggaran SKPD, yang tersembunyi dalam RKA-SKPD, akan menentukan berapa besar sisa anggaran (SILPA) pada akhir tahun.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pengertian otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu aspek penting yang ada di dalam hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik yaitu masalah keuangan daerah dan anggaran daerah.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) haruslah tepat dan akurat karena ini penting untuk program kegiatan dan proyek pembangunan Negara secara umum dan masyarakat khususnya. Namun tingkat ketepatan dan keakuratan dalam penyusunan APBD tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya kesalahan. Kesalahan penyusunan anggaran ini disebabkan karena tidak mudahnya melakukan penyusunan anggaran yang mengakibatkan banyaknya keterlambatan penyusunan APBD. APBD yang mengalami keterlambatan tersebut menandakan ketidakmampuan sebuah daerah untuk memproyeksikan atau meramalkan secara cepat dan tepat tingkat pendapatan dan pengeluaran sehingga munculnya *budget forecast errors* atau kesalahan dalam meramalkan anggaran. Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi kesalahan dalam meramalkan anggaran atau *budget forecast errors* yaitu dukungan politik, pendapatan daerah, periode jabatan, tingkat inflasi dan belanja daerah.

Gambar 1
Kerangka Konseptual



E. HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

- H1: Dukungan politik berpengaruh positif terhadap *budget forecast errors* pemerintah daerah.
- H2: Pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap *budget forecast errors* pemerintah daerah.
- H3: Periode jabatan kepala daerah berpengaruh positif terhadap *budget forecast errors* pemerintah daerah.
- H4: Belanja daerah berpengaruh positif terhadap *budget forecast errors* pemerintah daerah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dukungan politik tidak berpengaruh signifikan terhadap *budget forecast errors*. Sehingga dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya dukungan partai politik terhadap kepala daerah tidak menyebabkan terjadi kesalahan dalam proyeksi anggaran atau *budget forecast errors*.
2. Pendapatan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap *budget forecast errors*. Ini berarti semakin besar penerimaan pendapatan suatu daerah maka daerah tersebut semakin mandiri dan bebas mengalokasikan pendapatan yang diterima untuk anggaran tahun berikutnya. Daerah yang semakin bebas mengalokasikan pendapatan daerah yang diterimanya maka akan semakin besar terjadinya *budget forecast errors*.
3. Periode jabatan kepala daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap *budget forecast errors*. Dapat disimpulkan bahwa periode jabatan kepala daerah baik yang *incumbent* maupun *non-incumbent* tidak mempengaruhi adanya kesalahan dalam proyeksi/peramalan anggaran pemerintahan.

4. Belanja daerah berpengaruh positif terhadap *budget forecast errors*. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan belanja maka semakin tinggi tingkat *budget forecast errors*.

B. Keterbatasan

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian yaitu sumber data yang sebagian besar dari website pemerintah daerah, namun banyak *website* pemerintah daerah yang aktif tetapi sulit diakses serta tidak menampilkan informasi lengkap mengenai kepala daerah. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan sampel pemerintah daerah kabupaten/kota yang mengikuti pemilihan umum tahun 2015 dan mengkhususkan pada kabupaten/kota yang ada di Sumatera.

C. Saran dan Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan, maka saran dan implikasi dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi dalam penetapan APBD sehingga anggota legislatif baik yang berasal dari partai pendukung kepala daerah maupun tidak berasal dari partai pendukung kepala daerah dapat lebih terawasi dan meminimalkan terjadinya *fraud* yang dapat berakibat buruk pada kinerja pemerintah

daerah. Anggota legislatif juga perlu meningkatkan pemahaman terkait dengan APBD sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam mengawasi realisasi anggaran. Dengan memiliki pemahaman yang baik juga dapat meminimalisasi *budget forecast errors* dengan cara melakukan proses pengawasan secara lebih intensif terkait proses penganggaran agar dapat menjaga komitmen kepala daerah. Dalam penganggaran baik itu penganggaran pendapatan maupun belanja harus dilakukan analisis yang baik dan mendalam sehingga dapat meminimalkan kesalahan pada anggaran. Segala jenis belanja pemerintah daerah harus benar-benar dianalisis dan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat bukan hanya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dalam pencarian data bisa mencari langsung pada pemerintah daerah sehingga keakuratan dan kelengkapan data bisa di perbaiki. Penelitian selanjutnya diharapkan memperpanjang periode dan melengkapi sampel dalam mengukur *budget forecast errors* sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik, serta menambahkan beberapa variabel lainnya yang mempengaruhi dan juga bisa menggunakan metode dan alat pengukuran lainnya yang tidak digunakan penulis pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sukriy dan Asmara 2006. Perilaku Opportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Pendekatan *Principal-Agent Theory*. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado.
- Abdullah, Sukriy dan Nazry. 2015. Analisis varian Anggaran Pemerintah Daerah. Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, Vol. 6, No 2 Juli 2015. Diakses 15 Mei 2017.
- Adzani, Akhmad H. dan Martani, Dwi. 2014. Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat, Faktor Politik Dan Ketidakpatuhan Regulasi Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVII Lombok.
- Asher, Mukul, G. 2004. *The Impact Of Institutional Change on Forecast Accuracy A Case Of Study Of Budget Forecasting In Washington State*. International Journal Of Forecasting 20 (2004) 647-657. Washington State Caseload Forecast Council.
- Aziz, *et al.* 2000. *The Causal Relationship Between Tax Revenues and Government Spending in Malaysia*. Universitas Putra Malaysia, Working Paper.
- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta, Erlangga.
- Blanchard O dan Leigh D. 2013. *Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers*. International Monetary Fund. IMF Working Paper.
- Brogan, Michael. 2012. *The Political of Budgeting: Evaluating the Effect of the Political Election Cycle on State-Level Budget Forecast Errors*. Public Administration Quarterly SPRING. Rider University. 85-93.
- Brück, Tilman dan Stephan, Andreas. 2006. *Do Eurozone Countries Cheat with their Budget Deficit Forecasts?*. Kyklos. Blackwell Publishing. 59(1), 3-15.
- Carolina, Okki dan Sutaryo. 2014. Ketepatan Waktu Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah di Indonesia. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVIII Lombok.
- Clynch, Edward, dan Thomas Lauth. 1991. *Governors, Legislators, and Budgets: Diversity across the American States*. New York: Greenwood Press.

- Cornia, Gary C., Ray N., dan Andrea W. 2004. *Fiscal Planning, Budgeting, and Rebudgeting Using Revenue Semaphores*. Public Administration Review. 64 (2), 164-179.
- Darwanto dan Yustikasari Y. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2012 Tentang Daftar Provinsi, Kabupaten, dan Kota Seluruh Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2007 Tentang Data Keuangan Daerah.
- Fitriasari, Debby., dan Mustikarini, Widya A. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupate/Kota di Indonesia tahun Anggaran 2007. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin.
- Garamfalvi, L. 1997. *Corruption In The Public Expenditures Management Process*. Paper Presented At 8th International Anti-Corruption Conference, Lima, Peru.
- Garret, T.A dan Wagner G.A. 2004. *State Government Finances: World War II to the Current Crises*. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, March/April 2004, 86(2), pp.9-25.
- Ghozali. I. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Gourevitch., P., A., (2003) The politics of corporate governance regulation. *New York: Oxford University Press*, pp. 250.
- Hambrick, Donald C., dan Mason, Phyllis A. 1984. *Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers*. The Academy of Management Review, Vol.9, Issue 2 (April), pp:193-206.
- Halim, A. dan S. Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintah daerah: Sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1):53-64.
- Halim, Abdul, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002

- Hartanto, Rudy., dan Probohudono, Agung N. 2013. Desentralisasi Fiskal, Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah pada Tahun 2008 dan 2010. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado*.
- Hayo, Bernd dan Florian Neumeier. 2013. *Political Leaders' Socioeconomic Background and Public Budget Deficits: Evidence from OECD Countries*. Philipps-University Marburg.
- Jensen, M. C., dan Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kusnandar dan Siswanto D. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Masciandaro, Donato dan Quintyn. 2008. *Helping Hand Or Grabbing Hand ? Politicians, Supervision Regime, Financial Structure And Market View*. *Nort American Journal Of Economics And Finance* 19 (2008) 153-173.
- Munandar, M. 2000. *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Cetakan Ketigabelas. Yogyakarta: BPFE.
- Nafarin, M. 2004. *Penganggaran Perusahaan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Nordiawan, D., Iswahyudi S.P., dan Maulidah R. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Patrick, Patricia A. 2007. *The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Ph.D. Dissertation. The Pennsylvania State University, United States–Pennsylvania.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah.
- _____, Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

_____, No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ritonga, Irwan Taufiq dan Mansur Iskandar Alam. 2010. Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto.

Rochmatullah dan Probohudono (2014) *Praktik Belanja Bantuan Sosial Pemerintah daerah di Indonesia*, SNA 17 Mataram.

Sabeni, Arifin Imam Ghozali. 2008. *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta:BPFE

Sachsenroder, Wolfgang and ulrike E, Frings, eds.,1998. *Political party System and democratic Development in East and Southeast Asia*. Aldershot: Ashgate Publishing Limited

Shleifer, A. dan R.W. Vishny. 1997. *A Survey of Corporate Governance*. Journal of Finance, Vol 52. No 2. June 737-783

Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Penerbit Salemba.

Stuart dan Schoroeder. 1988. *Evaluation Of Commercial Economic Forecast For Use In Local Government Budgeting*. International Journal Of Forecasting 4 (1988) 33-43. Nort-Holland.

Suhardjanto, D., dan Yulianingtyas, Rena R. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemeerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). Jurnal Akuntansi dan Auditing, Vol. 8, No.1, pp:1-94.

Sularno, Fitri Megawati. 2013.” Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Skripsi. FE, Universitas Widyatama. Diakses 05 April 2017.

Sutaryo, dan Winarna, Jaka. 2013. Karakteristik DPRD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dukungan Empiris dari Perspektif Teori Keagenan. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado.

Sutaryo, dan rahma, Tiara. 2015. “Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Budget Forecast Errors Pemerintah Daerah Di Indonesia”. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

_____, Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Veiga, Jose F. dan Boukari, Mamadaou. 2016. *The Effect Of Politics on Budget Forecast Errors: Comparative Evidenve**. Public JEL Classification: D72, H72. Diakses 10 Mei 2017.

Winarna, J dan Murni, S. 2007. Pengaruh Personal Background, Political Background, dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006). Proceeding Simposium Nasional Akuntansi X Makasar.

Dari website:

<http://www.bps.go.id> (diakses 01 Mei 2017).

<http://www.wikipedia.org> (diakses 01 Mei 2017).

<http://www.tribunnews.com> (diakses 03 Mei 2017).

<http://www.wordpress.co.id> (diakses 20 Mei 2017).

<http://www.metronews.com> (diakses 3 mei 2017).